

BULETIN PARLEMENTARIA



NOMOR 894/II/II/2016

**DPR BERTUGAS NYAMAN,
TAK PERLU MEWAH**



DELEGASI DPR HADIRI
SIDANG KE-4 OECD
PARLIAMENTARY DAYS
DI PARIS



KOMISI VIII EVALUASI
LAPORAN KEUANGAN
HAJI 2014 DAN 2015



Jangan Lewatkan info DPR terkini
dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.gp.id



DPR BERTUGAS NYAMAN, TAK PERLU MEWAH

Ketua DPR Ade Komarudin meninjau sejumlah fasilitas di Kompleks Parlemen, diantaranya pertamanan, tempat pembuangan sampah, hingga gedung mekanik pada Minggu (7/02/2016).

PEKAN sebelumnya, Minggu (31/01/2016), Akom, panggilan akrab Ade, juga meninjau sejumlah sarana dan prasarana terkait sistem keamanan dan kebersihan Kompleks Parlemen.

Dengan berjalan kaki dan mengenakan pakaian olahraga, Akom ingin memastikan kebersihan maupun fasilitas di Kompleks Parlemen siap menunjang seluruh kegiatan Kedewanan dan staf Sekretariat Jenderal DPR RI. Ia menekankan pentingnya pemeliharaan seluruh sarana dan prasana yang ada di lingkungan DPR.

"Saya punya niat baik dengan DPR dan Kesetjengan DPR, supaya tugas kita semua lancar. Kita buat Dewan bertugas dengan nyaman, tidak perlu yang mewah. Wartawan juga mendapatkan fasilitas kerja yang lengkap. Apapun fasilitas untuk menunjang tugas teman-teman harus disediakan oleh Kesetjengan," kata Akom.

Dalam sidaknya ini, Akom didampingi sejumlah pejabat Setjen DPR, diantaranya Winantuningtyastiti (Sekretaris Jenderal DPR), Setyanta Nugraha (Inspektur Utama Setjen DPR), Achmad Djuned



Ketua DPR Ade Komarudin didampingi Sekjen DPR saat meninjau sistem keamanan kompleks parlemen

(Deputi Bidang Administrasi), Damayanti (Deputi Persidangan), Mardian Umar (Kepala Biro Umum), Makmur (Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara), hingga Suratna (Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial).

Politisi Golkar itu usai meninjau Gedung Mekanik mengatakan, jika ada permasalahan pada alat-alat kelistrikan di dalamnya, maka seluruh penerangan gedung bisa bermasalah. Mengingat, Gedung Mekanik merupakan pusat kelistrikan di Kompleks Parlemen.

"Penerangan Kompleks Parlemen ini berawal dari gedung ini (sembari menunjuk Gedung Mekanik). Jika di sini ada masalah, semua gedung bermasalah. Saya sudah lihat ke dalam, bagaimana kesiapannya, jika ada acara besar, seperti acara kenegaraan, yang melibatkan MPR dan DPD, jantungnya di sini," tekan Ade.

Sementara pada sidak pekan sebelumnya, Akom menekankan pentingnya Kompleks Parlemen agar terlihat bersih dan indah dilihat. Ia pun meminta petugas kebersihan diperbanyak agar semuanya terjaga terus dengan

baik. Karena Kompleks Parlemen ini terdiri dari tiga lembaga negara, yakni DPR, MPR, dan DPD, ia pun akan berkoordinasi dengan Ketua MPR dan Ketua DPD.

"Konsepnya, Gedung Parlemen tak usah mewah, namun aman dan nyaman buat semua orang yang bekerja mengabdikan dirinya disini. Disamping itu, para pelajar dari daerah pun bisa merasa nyaman untuk melakukan studi banding di gedung bersejarah ini," imbuh Akom,

Politisi asal dapil Jawa Barat ini juga menyatakan keinginannya untuk mendirikan Library of Parliament terbesar se-ASEAN yang bisa menampung semua referensi buku dari berbagai disiplin ilmu yang dapat diakses oleh seluruh warga sehingga dapat menambah pengetahuan serta memajukan pendidikan di Indonesia. (sf,ann). Foto : Tim Parle



**BULETIN
PARLEMENTARIA**

SUSUNAN REDAKSI

PENGAWAS UMUM : Pimpinan DPR-RI • **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** : Dr. Winantuningtyastuti, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) • **WAKIL KETUA PENGARAH** : Dra. Damayanti, M.Si, (DEPUTI PERSIDANGAN) • **PIMPINAN REDAKSI** : Drs. Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) • **WK. PIMPINAN REDAKSI** : Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak) • **REDAKTUR** : Mastur Prantono • **SEKRETARIS REDAKSI** : Suciati, S.Sos, ANGGOTA REDAKSI : Nita Juwita, S.Sos, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Hendra Sunandar, Surahmad Eko, Ria Nur Mega • **REDAKTUR FOTO** : Eka Hindra, Iwan Armanias • **FOTOGRAFER** : Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Devi Iriandi, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah • **ADMINISTRASI FOTO** : Hasri Mentari • **SIRKULASI** : Bagus Mudjiharjanto • **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** : Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN : Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan) **WK. PIMPINAN PENERBITAN** : Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) Email : penerbitandpr@gmail.com [isi berita dan materi foto diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan]

SELURUH FRAKSI SETUJU PEMBAHASAN KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA-JERMAN DAN INDONESIA-CHINA

Seluruh fraksi di Komisi I DPR RI menyetujui RUU tentang pengesahan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman terkait kerjasama di bidang pertahanan, serta RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintah RRC tentang kerjasama aktivitas dalam pertahanan.

HAL tersebut terungkap dalam rapat Komisi I terkait pandangan fraksi atas RUU tentang pengesahan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai kerjasama di bidang pertahanan, serta RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintah RRC tentang kerjasama aktivitas dalam bidang pertahanan, Rabu (10/2) di ruang rapat Komisi I, Senayan Jakarta.

Meski seluruh fraksi menyetujui, namun

pada kesempatan itu fraksi Partai Gerinda dan fraksi PAN membuat catatan tersendiri. Anggota Komisi I DPR RI, Andika Pandu Puragabaya yang membacakan pandangan fraksi Partai Gerinda mengatakan bahwa fraksi menyetujui RUU tersebut dengan empat catatan.

"Fraksi Partai Gerinda menyetujui kedua RUU tersebut untuk dibahas ke tingkat dua pada rapat paripurna dewan selanjutnya dengan empat catatan," ujar Andika yang membacakan pandangan fraksi Partai Gerinda.



Anggota Komisi I DPR saat menandatangani pengesahan MoU Kemenhan RI dan Kemenhan Jerman

Empat catatan itu adalah dalam pelaksanaan UU tersebut nantinya sesuai amanat UU NO.24 Tahun 2000 pasal 4 ayat 2, pemerintah Indonesia harus berpedoman pada kepentingan nasional yang berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan baik hokum nasional dan internasional.

Kedua, para pemangku kebijakan terkait *stakeholder* menempatkan kepentingan nasional dan dengan teguh mampu menjaga rahasia negara. Catatan ketiga adalah agar persetujuan ini dapat diaplikasikan secara maksimal perlu adanya penangan secara koordinatif dan berkesinambungan antara semua instansi pemerintah, maupun kerjasama antar pemangku jabatan terkait sesuai dengan bidang dan lingkup kerjasama.

Catatan ke empat dari fraksi Partai Gerinda adalah jika terjadi perselisihan kiranya dapat diselesaikan secara damai melalui negosiasi dalam komite bersama. Dan apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui menteri pertahanan masing-masing. Dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dapat melalui saluran diplomatik.

Sementara itu fraksi PAN dalam pandangannya yang disampaikan Budi Youyastri mengatakan bahwa dalam konteks kerjasama internasional ini hendaknya didasari atas kepentingan nasional dan kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk itu dalam setiap kerjasama di bidang pertahanan selanjutnya Fraksi PAN meminta agar proses *transfer of technology* dapat diwujudkan. Indonesia juga dapat tetap memiliki hak paten yang tetap muncul dalam proses produksi alutsista. (Ayu), [foto : eno/parole/hr](http://eno/parole/hr).

BAPPEBTI DIMINTA LAKUKAN SOSIALISASI RESIKO PERDAGANGAN BERJANGKA

ANGGOTA Komisi VI DPR-RI Nasril Bahar, menilai para birokrat yang bertugas di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan (Bappebti)

tidak melakukan sosialisasi informasi secara maksimal tentang resiko sistem perdagangan alternatif.

"Salah satu tugas Bappebti itu pencerdasan dan sosialisasi, Bappebti

sangat kurang dalam tugas ini," ujarnya usai Komisi VI DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Bappebti, (9/2).

Dengan demikian, Nasril



mengibaratkan, banyak nasabah yang terjerumus ke dalam lubang buaya. Padahal, menurutnya sistem perdagangan alternatif sangat rentan dengan kerugian. Maka sebaiknya masyarakat harus tahu tentang informasi ini, agar masyarakat yang ingin bergabung dalam bisnis perdagangan alternatif dapat melakukan pilihan secara rasional, dengan mengetahui dan menghitung keuntungan dan kerugian dalam bisnis ini.

Sementara itu, yang dilakukan oleh petugas marketing pialang kepada nasabah hanya menawarkan informasi-informasi keuntungan dan mengabaikan informasi resiko bisnis perdagangan alternatif. "Nah kalau yang dibentuk *image* keuntungan ya nasabah kan senang, tapi kenyataannya, dalam beberapa kondisi, yang terjadi kerugian, bahkan bukan kerugian yang kecil, kerugian besar pun terjadi," keluh Nasril.

Anggota Dewan dari daerah pemilihan Sumatera Utara III ini juga mengatakan regulasi yang menjadi landasan kerja dari Bappebti adalah bursa berjangka dan perdagangan berjangka

berjalan dengan baik, dan mampu memberi keuntungan pada pendapatan negara. Namun yang terjadi justru dalam lingkaran bisnis ini, banyak mafia. "Nah ini kan semuanya mafiai, mafia terhadap sistem perdagangan alternatif," tukas Nasril.

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengungkapkan dalam perdagangan alternatif ada yang berjalan secara legal dan ilegal. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan, padahal sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2011 tentang komoditi perdagangan berjangka ini merupakan tugas dari Bappebti.

"Perdagangan alternatif di sini ada yang legal ada yang ilegal, nah terkadang dicampur-adukkan antara ilegal dan legal. Ini tentunya yang perlu kita awasi, yang legal sendiri pun sering menyalahi aturan perundang-undangan," kata Nasril.

Anggota Komisi VI ini juga meminta kepada Kepala Bappebti Sutriyono Edi beserta jajarannya untuk bekerja secara maksimal, karena

menurut temuan di lapangan, masih banyak harga komoditi hasil bumi asal Indonesia justru diatur oleh negara-negara asing. Hal ini tentu merugikan pendapatan nasional.

Pada sumber bahan dari komoditi dagang berasal dari sumber daya kekayaan nasional. (eko,mp)/foto:jayadi/parle/iw.



Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar

HAPUS STIGMA PELEMAHAN ATAU PENGUATAN REVISI UU KPK

Sembilan fraksi DPR menyetujui draf revisi Undang - Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya. Dengan hanya satu fraksi

dibahas ditingkat demikian yakni Fraksi Gerindra yang menolak revisi UU KPK.



Ketua Baleg DPR Suratman Andi Agtas

"HASIL rapat hari ini, akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk diputuskan akan diserahkan ke siapa, apakah kembali ke Baleg atau Komisi pengusung," ujar Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat Baleg beragendakan pandangan mini fraksi Gedung Nusantara 1, Senayan, Rabu (10/02) sore.

Fraksi yang menyetujui isi draf Revisi Undang - Undang KPK untuk ialah Fraksi Hanura, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa, Fraksi Persatuan Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, F-PPP, dan F-Nasdem dan hanya Fraksi Gerindra yang dari awal konsisten menolak agar Revisi Undang - Undang KPK ini tidak dilanjutkan.

Selain ke - empat poin utama yakni mekanisme penyadapan, pembentukan Penyidik dan Penyelidik, Dewan Pengawas dan Kewenangan SP3. Badan legislasi juga akan mendalami Pasal 32 dan Pasal 36 dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK agar diberikannya norma yang jelas terhadap komisioner KPK untuk mengundurkan diri dari masa jabatannya terlebih dahulu apabila tertarik pada tataran jabatan publik atau pemerintah lainnya.

Anggota Baleg Al Muzzamil Yusuf (F-PKS) menegaskan ketiadaan aturan itu memberikan peluang terciptanya conflict of interest manakala komisioner KPK di rentang masa jabatannya ingin menduduki jabatan

politik lainnya, " Itu akan sangat rentan menjadi barter antara penegak hukum dan politik," paparnya.

Firman Soebagyo selaku Ketua Panja Harmonisasi Revisi UU KPK menyambut baik usulan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. "Ini harus diatur bagaimana mekanismenya, dan merupakan tugas dari DPR sesuai amanat konstitusi untuk melakukan evaluasi apakah UU itu berjalan on the right track apa tidak," tegas politikus Golkar ini.

Begitupun berkaitan pembahasan undang - undang ini diharapkan agar tidak lagi terjebak stigma pelemahan atau penguatan, melainkan pelurusan terhadap masalah Undang - Undang KPK yang selama ini memang perlu ada evaluasi dan penyempurnaan. Tidak kalah pentingnya keinginan dari keseluruhan fraksi akan adanya sinergitas antara lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan KPK) untuk meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi. (ann,mp) foto:jay/parle/hr.

HETIFAH: MANDATORY SPENDING UNTUK CAPAI TARGET PEMBANGUNAN

BADAN Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar ekonomi membahas tantangan APBN 2016 dan pengelolaan *Mandatory Spending* yang semakin membengkak Rabu (10/2). Hadir dalam kesempatan tersebut Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina dan Enny Sri Hartati, Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF).

Dalam acara tersebut, kedua narasumber mamaparkan bahwa di tahun 2016 Indonesia masih banyak menghadapi



Anggota Banggar DPR Hetifah

tantangan ekonomi. "Tantangan ekonomi Indonesia tahun 2016, antara lain disebabkan karena perlambatan ekonomi global, Pertumbuhan ekonomi masih melambat, kualitas pertumbuhan ekonomi menurun, daya beli masyarakat menurun" ujar Enny. Ia menambahkan bahwa perlambatan ekonomi Tiongkok sangat berpengaruh pula pada perkembangan ekonomi Indonesia.

Terkait *mandatory spending* dalam APBN 2016, kata anggota Banggar Hetifah hal itu adalah merupakan instrumen untuk mencapai target pembangunan yang lebih spesifik. "Dalam APBN 2016 telah ditetapkan target pembangunan yang sangat spesifik, seperti pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan" ujar

politisi Fraksi Golkar tersebut.

Lebih lanjut menurut Anggota Dewan dari dapil Kaltim-Kaltara ini, DPR membuat UU dan menetapkan *mandatory spending* adalah demi tercapainya target pembangunan.

"Ketika kita (DPR) membuat UU yang menetapkan *mandatory spending* tentang Pendidikan dan juga Kesehatan, tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai target pembangunan," tandas Hetifah. Diketahui, bahwa porsi *mandatory spending* pada APBN 2016 adalah sebagai berikut: Anggaran pendidikan Rp. 419,17 triliun (20% dari belanja negara), Anggaran kesehatan Rp. 104,78 triliun (5% dari belanja negara), Anggaran DAU Rp. 385,36 triliun (27,7% dari PDN neto), Anggaran Otsus Papua dan Otsus Aceh masing-masing sebesar Rp. 7,07 triliun (2% dari DAU nasional), Anggaran dana desa sebesar Rp. 46,92 triliun (6,48% dari transfer ke Daerah). (eko,mp)/foto:andri/parle/iw.

RUU MINOL SELAMATKAN GENERASI BANGSA

Anggota Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) Abdul Fikri menegaskan, sebaiknya para asosiasi jangan hanya membahas untung rugi terkait RUU Minol. Sebab pokok permasalahan yang lebih urgen adalah tentang nasib generasi bangsa ke-depan



"Kita semangatnya untuk menyelamatkan bangsa dan generasi. Jadi kita tidak hanya bicara positifnya melainkan juga masalah negatifnya ke-depan," jelasnya pada RDPU dengan Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APMBI), Ketua International Spirits and Wine Alliance (ISWA), serta Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) di ruang Rapat Pansus C Senayan, Jakarta, Rabu (10/2)

Anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno dari dapil Jawa Tengah X mengapresiasi pandangan - pandangan signifikan dari para narasumber untuk dibahas bersama pemerintah di tingkat selanjutnya.

Menurutnya, oplosan memang merisaukan dan banyak menelan korban jiwa padahal industry minol ini sudah sarat aturan.

Terdapat 36 peraturan pusat dan 150 peraturan daerah yang sudah mengatur minuman beralkohol sehingga dibutuhkan suatu payung hukum yang dapat merangkum berbagai peraturan daerah yang sudah ada. "Rancangan Undang-Undang ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan regulasi yang sudah ada," tekan politisi F-PDIP.

Sebelumnya, perwakilan GIMMI (Grup Industri Minuman Malt Indonesia) memaparkan bahwa kontribusi cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan A terhadap

pendapatan negara cukup signifikan, yakni sebesar 65 hingga 75 persen. Menurutnya, pelarangan minuman beralkohol akan menciptakan kerugian akibat munculnya dampak sosial dan ekonomi dari maraknya pasar gelap (grey economy).

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Aryo PS Djojohadikusumo para asosiasi mengusulkan dibuatnya pengaturan secara komprehensif sebagai landasan fundamental minuman beralkohol yang berkepastian hukum. Mereka juga meminta Pemerintah melakukan pengendalian minol mulai dari tata produksi, tata niaga (peredaran dan distribusi) hingga pada tahapan konsumsi. (ann,mp), [foto : arief rachman/parle/hr](http://foto:arief.rachman/parle/hr).



Anggota Pansus RUU Minol Abdul Fikri

DELEGASI DPR HADIRI SIDANG KE-4 OECD PARLIAMENTARY DAYS DI PARIS

DPR mengirim Delegasi untuk menghadiri *The 4th OECD Parliamentary Days* di Paris, Perancis, tanggal 3 hingga 5 Februari 2016 lalu, terdiri Rofi Munawar dari FPKS selaku Ketua delegasi, didampingi anggota Yoseph Umar Hadi (Fraksi PDIP) dan Sartono Hutomo dari Fraksi Demokrat.

OECD dibentuk pada tahun 1961 oleh 18 negara Eropa beserta Amerika Serikat dan Kanada, bertujuan untuk

mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. OECD mempromosikan dua prinsip utama, yaitu demokrasi dan free market economy.

Ada enam agenda dalam the 4th OECD *Parliamentary Days* yakni *Financing Democracy*, *World Energy Outlook*, *Uberisation of Economy*, *Combatting Terrorist Financing*, *Finance and Inclusive Growth*, dan *Megatrends*. Delegasi Indonesia memberikan

sejumlah masukan dan kontribusi dalam beberapa agenda acara.

Sekjen OECD Angel Gurría saat membuka acara tersebut menyampaikan, saat ini pemerintahan dan parlemen-parlemen di banyak negara di dunia mengalami krisis kepercayaan (trust issues) dari masyarakatnya. Krisis ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan korupsi telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat

terhadap penyelenggara negara. Karena pentingnya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Trust Agenda dijadikan isu utama dalam acara Parliamentary Days tahun ini.

Delegasi DPR RI, Yoseph Umar Hadi menyampaikan bahwa Indonesia tidak luput dari krisis kepercayaan oleh masyarakatnya. Terkait dengan hal ini, OECD menekankan tiga hal utama untuk mengembalikan kepercayaan, yakni INTEGRITAS, dengan meningkatkan usaha pemberantasan korupsi; PRO RAKYAT, dengan mengeluarkan kebijakan yang mementingkan kepentingan rakyat yang bersifat adil, merata, dan berkelanjutan, serta KEPASTIAN, dimana pemerintah harus mampu meminimalisir ketidakpastian dalam beragam bidang seperti ekonomi dan politik.

Dalam sesi "World Energy Outlook", Delegasi Indonesia menggarisbawahi pentingnya negara-negara dunia untuk mematuhi Paris Agreement yang disepakati dalam COP21 tahun lalu di Paris. Indonesia menekankan pentingnya untuk mempromosikan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Dipaparkan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak



Delegasi DPR saat menghadiri The 4th OECD Parliamentary Days

sumber energi alternatif yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti geothermal, tenaga air, tenaga matahari dan biofuel.

Indonesia merupakan satu-satunya perwakilan dari Asia yang menghadiri acara ini. Dengan menyampaikan sejumlah intervensi dalam beberapa

agenda, kehadiran Delegasi DPR RI telah ikut memberikan kontribusi dan memperkaya jalannya diskusi serta kian mempererat hubungan antara DPR RI dengan OECD sebagai organisasi internasional yang kerap bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. (bksap/mp), [foto : dok.bksap/parole/hr](http://foto:dok.bksap/parole/hr).

PEMEKARAN DAERAH DIPERLUKAN AGAR PEMBANGUNAN LEBIH OPTIMAL



Anggota Komisi II DPR Ammy Amalia Fatma

Anggota Komisi II DPR Ammy Amalia Fatma Surya (F-PAN) menilai bahwa pemekaran daerah adalah hal yang penting agar pembangunan di daerah tertinggal bisa berjalan optimal. Ini menjadi perhatian serius bagi DPR mengingat beberapa daerah di Indonesia masih memiliki ketimpangan yang cukup besar dibanding daerah lain.

“Jika pembangunan di tingkat propinsi dan kabupaten belum maksimal dibanding daerah lain maka perlu dilakukan pemekaran. Daerah yang belum mendapatkan perhatian pemerintah perlu segera mendapatkan perhatian khusus.” ujar Ammy ketika ditemui usai Rapat



Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat, Provinsi Sulawesi Timur dan Kabupaten Muna Timur yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Lukman Edy di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (10/02).

“Pembangunan infrastruktur perlu dioptimalkan, sekarang ini perkembangan

infrastruktur yang bisa dilihat adalah di Pulau Jawa. Sementara di pulau seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua belum terlihat perkembangan yang signifikan.” papar anggota DPR Dapil Jawa Tengah VIII ini.

Salah satu daerah yang direncanakan menjadi daerah otonom baru adalah Cilacap Barat yang juga dipandang sebagai segitiga emas yang berbatasan

langsung antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Cilacap juga memiliki perputaran niaga yang cukup besar karena memiliki pelabuhan sehingga banyak kapal transit. “Sehingga potensi pertumbuhan akan menjadi besar jika ditunjang dengan pemerintahan yang baik dan bisa memperhatikan daerahnya,” pungkasnya. (hs,mp)/foto:runi/parle/iw.

KOMISI IV DPR SIDAK PERUM BULOG DIVRE SULSELBAR



Tim Kunspek Komisi IV DPR tinjau Perum Bulog Divre Sulselbar

TIM Kunjungan Kerja Spesifik RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Komisi IV DPR RI dipimpin Herman Khaeron usai pertemuan dengan Civitas Akademika Universitas Hasanuddin (Unhas) langsung melakukan sidak ke Perum Bulog Divre Sulselbar guna melihat ketersediaan dan keterjangkauan pangan Nasional, Makassar, baru-baru ini.

Diketahui 1,6 juta ton dari 3,7 juta ton persediaan pangan nasional dikontribusi oleh para petani di Sulawesi Selatan. “Tentu ini menjadi sebuah prestasi bagi kami bahwa Bulog mampu memaksimalkan pengadaan dari dalam negeri yang dibeli dari petani kita,” papar politisi Demokrat ini.

Wakil Ketua Komisi IV ini memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi yang memberikan atensi yang cukup baik kepada Bulog dalam menjalankan tugasnya.

Herman juga menekankan agar Bulog tidak hanya menjaga kuantitas tetapi juga

kualitas terutama untuk beras raskin. Mengingat peran Bulog saat ini cukup strategis tidak hanya sebagai stabilisator harga pangan tetapi juga *buffer stock* pangan nasional.

“Ada kenaikan sekitar Rp 200-Rp 300. Tetapi ini jangan dibiarkan karena akan menjadi liar dan menimbulkan spekulasi di masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, Bulog sangat rentan dengan politisasi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan mafia panen. Begitu ada kenaikan yang melebihi batas referensi, Bulog bisa langsung melakukan operasi pasar dan kajian terhadap fenomena fluktuasi harga supaya Bulog

bisa mempersiapkan diri ketika menghadapi fluktuasi.

Mudah-mudahan kesiapan yang ditunjukkan oleh Sulawesi Selatan juga ditunjukkan oleh Bulog di daerah lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan daerah surplus.

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI berjumlah 4 orang anggota, dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron didampingi I Made Urip dari F-PDIP, Muhammad Nasyit Umar dari F-PD, dan Andi Akmal Pasluddin dari F-PKS. (iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

FADLI ZON DESAK TUNTUTAN BURUH HARUS DIDUKUNG

WAKIL Ketua DPR Fadli Zon di ruang kerjanya Gedung DPR, Senayan, Rabu (10/2) menerima Perwakilan Serikat Buruh. Banyak tuntutan buruh di seluruh Indonesia terutama dari organisasi-organisasi buruh yang semakin kuat sekarang ini sehubungan makin banyaknya pabrik yang tutup.

Menurut Fadli Zon suara mereka perlu didengarkan karena buruh merupakan salah satu profesi yang paling banyak di Indonesia selain petani. Buruh juga menunjang industri, menunjang

perusahaan serta menjadi tulang punggung ekonomi.

Wakil Ketua DPR RI mengatakan perlu adanya peningkatan dalam KHL (kebutuhan Hidup layak). Misalnya upah layak, bukan upah murah. Layak itu artinya bisa sesuai dengan kebutuhan.

“Saya kira tuntutan buruh ini harus didukung karena kita akan menghadapi suatu era globalisasi terutama globalisasi yang bersifat regional. Berarti akan terjadi satu kompetisi yang lebih besar. Siapa yang kuat akan diuntungkan, sementara



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima perwakilan Serikat Buruh

Ketua Serikat Buruh Muhammad Ihsan mengkritisi masalah pertanian dan ekonomi yang m e n g g u n c a n g sehingga banyak pabrik yang tutup. Dia mempertanyakan faktor apa yang m e m b u a t perusahaan asing gulung tikar dan henggang dari Indonesia.

Ia menambahkan, di bidang pertanian tidak adanya regenerasi sehingga anak-anaknya lebih memilih hijrah ke Jakarta untuk menjadi buruh. Ini terjadi karena mereka memiliki *mindset* bahwa jika menjadi seorang petani harus siap menjadi miskin dan status ekonominya rendah.

Kepada Fadli Zon yang juga Ketua HKTI, mereka berharap kedepannya bisa konsen mengarap anak muda, bila perlu dibuatkan suatu lembaga agar mereka aktif. Anak muda yang datang ke Jakarta harus dideteksi, dididik dan dikembalikan ke kampung untuk membangun desanya" Mereka pun menyampaikan belum siapnya menghadapi MEA. Anak muda di kota galau, apalagi anak desa," pungkasnya. [\(rnm,mp\)/foto:naefurodji/parle/iw.](#)

lemah akan tersisih. Nah kita ingin tentu menjadi pihak yang diuntungkan dan dapat memanfaatkan kesempatan ini." ujar politisi Gerindra ini.

" T o l o n g pemerintah tidak hanya melakukan pencitraan tetapi melihat di lapangan apa yang terjadi. Jika pemerintah tidak juga menangani masalah ini serikat buruh akan menggelar demo lebih besar," ujar Ihsan.

KOMISI II APRESIASI PEMBENTUKAN PROPINSI MADURA



Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman

KETUA Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman (F-Golkar) mengapresiasi usulan pembentukan provinsi Madura. Hal ini disampaikan saat melakkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Pembentukan Provinsi Madura (P4M) di Ruang Rapat Komisi II Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/02).

"Komisi II menyambut baik upaya yang dilakukan oleh P4M. Kita juga menyarankan agar panitia ini mempersiapkan hal-hal teknis yang lebih strategis. Karena persyaratan pembentukan pemerintah daerah ada

persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan kapasitas daerah." ujar Rambe saat memimpin rapat.

Rambe juga meyakinkan bahwa saat ini tidak ada moratorium dalam rangka pemekaran daerah otonomi baru. Sehingga usulan ini bisa ditindaklanjuti dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Tidak ada moratorium dalam rangka pemekaran untuk daerah otonom baru. Ke depan, kita juga tidak akan menerima panitia lain selain yang ada disini," ujar Politisi asal Dapil Sumatera Utara II ini.

Seperti diketahui, pada tanggal 10 November 2015 P4M telah melakukan deklarasi untuk mendorong dibentuknya Provinsi Madura. Hal itu dilakukan agar Madura ke depan bisa mendapatkan kehidupan bermasyarakat yang lebih layak dari sebelumnya.

Saat ini secara administratif, Madura menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Pulau Madura juga dikelilingi oleh beberapa pulau yakni pulau Gili Raja, pulau Kambing, pulau Iyang, pulau Genteng, pulau Puteran, pulau Sapudi, dan pulau Raas. [\(hs,mp\)/foto:runi/parle/iw.](#)



KOMISI VIII EVALUASI LAPORAN KEUANGAN HAJI 2014 DAN 2015



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

KOMISI VIII DPR RI melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan Haji Tahun 1435H/2014 M dan 1436 H/2015 M. Komisi VIII DPR RI mengharapkan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah diminta memperbaiki kinerja penyelenggaraan ibadah haji.

"Komisi VIII mendesak Menteri Agama RI untuk memperbaiki kebijakan dan mekanisme kuota secara lebih baik, cermat dan inovatif dengan tetap pada prinsip keadilan dan transparan agar tidak terjadi sisa kuota haji reguler dan haji

husus di tengah antrian calon haji yang panjang," kata Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay, saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dengan agenda Evaluasi Laporan Keuangan Haji Tahun 1435H/2014 M dan 1436 H/2015 M, serta pembentukan Panja (Panitia Kerja) Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH), Selasa (9/2) di Jakarta.

Selanjutnya Komisi VIII mendesak Menteri Agama memperbaiki pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap

komponen-komponen BPIH. Menteri Agama diminta meningkatkan akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji sehingga tidak terjadi kesalahan penyajian data.

"Komisi VIII meminta Kementerian Agama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Biaya Penyelenggaraan Haji," tegasnya.

Komisi VIII dan Menteri Agama sepakat akan membentuk Panja BPIH tahun 2016. "Kita sepakati membentuk Panja BPIH tahun 2016, dan tim pengawasan," jelas Saleh.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan, sangat setuju dengan adanya pembentukan Panja BPIH

di Komisi VIII DPR RI tersebut. Hal ini bertujuan, agar pemerintah lebih profesional dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan ibadah haji di tahun 2016.

"Sangat setuju, untuk memperbaiki kinerja Kementerian Agama. Semua upaya memperbaiki kinerja saya dukung," kata Lukman Hakim.

Dalam rapat Panja tersebut, masing-masing anggota dari Komisi VIII DPR dan juga jajaran Kementerian Agama telah mengesahkan Panja BPIH 2016 tersebut.

(as), foto : eno/parle/hr.

DPR APRESIASI PEMERINTAH TANGANI EKS GAFATAR

KOMISI VIII DPR memberikan apresiasinya kepada Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani pengungsi eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Bahkan Pemprov Kalbar pun memfasilitasi pemulangan eks anggota Gafatar ke daerah asalnya.

Demikian disampaikan Ketua Komisi

VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay, usai meninjau kamp pengungsian eks Gafatar di Detasemen Pembekalan dan Angkutan Kodam XII/Tanjung Pura di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (29/01/2016) lalu. Selain tinjau pengungsian, tim kunjungan spesifik Komisi VIII DPR juga menggelar pertemuan dengan Gubernur Kalbar dan jajaran.

"Penilaian kami, bantuan dari Pemerintah cukup bagus. Cukup sigap. Kita juga berterima kasih kepada TNI yang telah memberikan tempat ini, dan turut serta mengawasi secara langsung, tentang penanganan para pengungsi. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan, mereka (eks Gafatar) tidak di sini lagi, dan kembali kepada keluarga masing-masing,"

harap Daulay.

Politisi F-PAN itu berharap, segenap jajaran Pemprov Kalbar sabar dalam menghadapi permasalahan ini. Daulay memastikan, seluruh temuan di lapangan akan dijadikan referensi dalam mengambil kebijakan, saat Komisi VIII DPR rapat kerja dengan Kementerian terkait.

"Kami berharap Bapak Gubernur dan jajarannya tetap sabar menangani masyarakat yang seperti ini. Bapak Gubernur dan jajarannya sudah *on the track* dalam menangani masalah ini, dan mudahan ke depan cobaan-cobaan seperti ini tidak datang lagi di Kalimantan Barat, karena mengganggu konsentrasi Bapak Gubernur untuk membangun Kalimantan Barat," imbuh Daulay.

Ketika ditanya mengenai adanya indikasi dugaan penyimpangan ideologi oleh para anggota Gafatar, Daulay memastikan pihaknya akan mendalami beberapa hal yang sangat kritis. Selain itu, pemikiran dan pemahaman Anggota Gafatar ini harus segera dibenahi. Apalagi, ada indikasi anggota Gafatar memiliki target untuk mendirikan Negara dalam Negara, dimana ini sudah menyimpang dari konteks kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita mendesak Kepolisian untuk menelusuri lebih detail keberadaan Gafatar ini, jika ada ditemukan pelanggaran hukum baik perorangan maupun organisasi, kita minta ditindak tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kita juga

mendesak kepada pengadilan agama untuk menggunakan seluruh aparaturnya yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melakukan pembinaan keagamaan," tegas politisi asal dapil Sumatera Utara itu.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalbar, Cornelis, mengatakan bahwa keadaan darurat Bencana Sosial di Kalbar ditetapkan hingga 4 Februari 2016. Ia berharap, sebelum batas waktu, seluruh eks Gafatar ini sudah kembali dari daerah asalnya.

Gubernur juga memastikan, pihaknya telah bekerja keras dalam menangani

permasalahan ini, walaupun masih ada kendala di sisi pembiayaan. Namun menurutnya, keselamatan para eks Gafatar ini lebih diutamakan. Ia pun berharap, Komisi VIII DPR dapat berkoordinasi kepada Pemerintah Pusat mengenai biaya pengembalian eks Gafatar ini.

Kunjungan spesifik ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid (F-Gerindra), dan Anggota Komisi VIII DPR Agus Susanto (F-PDI Perjuangan), Kuswiyanto (F-PAN), Bisri Romly (F-PKB), dan Achmad Mustaqim (F-PPP). (sf), foto : sofi/parle/hr.



Tim Kunspek Komisi VIII DPR tinjau eks Gafatar



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari

PPFN PERLU DIBERI ANGGARAN MEMADAI

KOMISI X DPR, melalui Panja Perfilman Nasional, mendesak Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk Perum Produksi Film Negara (PPFN). Pasalnya, selama ini PPFN mengakui tidak pernah menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Pemerintah.

Hal itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja Perfilman Nasional, Komisi X DPR dengan Direktur Utama PPFN, Shely Arifin beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Selasa (9/02/2016).

"Mereka hidup dari sisa-sisa yang ada, seperti *royalti*, menyewakan tempat dan *property*, dan mereka bisa *survive*.



Saya kira ini perlu kita apresiasi," kata Wakil Ketua Komisi X DPR, sekaligus Pimpinan Panja Perfilman Nasional, Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS), usai RDP.

Hal itu pun dibenarkan Dirut PPFN. Ia mengatakan, selama ini PPFN menggantungkan pendapatannya dari sponsor. Selain itu pendapatan perusahaan juga diperoleh dari pengelolaan aset seperti menyewakan studio.

Poin lain yang menjadi kesimpulan rapat adalah, Panja Perfilman Nasional mendorong PPFN perlu bekerjasama dengan Kementerian atau Lembaga lain yang memiliki fungsi pengembangan perfilman sehingga jumlah produksi film negara PPFN dapat meningkat secara signifikan.

"Panja Perfilman Nasional memandang bahwa PPFN harus diberdayakan secara

optimal untuk menghadapi infiltrasi budaya asing melalui perfilman," lanjut Kharis.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu juga menambahkan, Panja mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, untuk mensinergikan pelaksanaan program revolusi mental dengan PPFN. (sf), foto : dev/parle/hr.

PAKAR HUKUM SETUJU REVISI UU KPK



Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang pakar hukum pidana Prof. DR. Romli Atmasasmita dan Prof. DR. Andi Hamzah terkait dengan revisi/perubahan atas RUU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

"Jadi pada prinsipnya kita undang beliau ini karena punya kompetensi terhadap lahirnya UU KPK dan pembentukan KPK sehingga mempunyai satu tanggung jawab moral terhadap UU ini," jelas Firman saat ditanyai perihal mekanisme dalam mengundang nara sumber saat rapat di Gedung Nusantara I, Selasa (10/2).

Romli Atmasasmita yang juga

merupakan arsitek pembentukan KPK menyetujui perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Harapan kita waktu itu muncullah anak bangsa yang punya integritas penuh, professional dan akuntabel namun perjalanannya tidak seperti yang diharapkan," ujar Romli.

Ia juga menyetujui terhadap perubahan empat poin dalam RUU KPK yakni Mekanisme Penyadapan, Dewan Pengawas, Pembentukan Penyelidik dan Penyidik, serta Kewenangan KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3). Perlu semua

diubah, lebih dari empat pun tidak masalah demi perbaikan. Khususnya pembentukan dewan pengawas yang sebaiknya di luar struktur organisasi KPK dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Terpaksa harus dibentuk dewan pengawas karena pengalaman masa lalu, KPK jilid III, keputusan pra-peradilan dua kasus BG dan HB sudah menunjukkan KPK tidak akuntabel," ujarinya.

Hal senada disampaikan anggota FPDI Perjuangan Henry Yosodiningrat dengan menambahkan bahwa revisi UU terhadap KPK merupakan suatu keharusan. Politisi PDI-P ini menyinggung Pasal 21 ayat 4 Undang - Undang No 30 Tahun 2002 yang menyebutkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.

Menurutnya, ini sudah kelewatan pasalnya untuk menjadi penuntut umum harus melalui jenjang pendidikan khusus terlebih dulu. "Kalau seorang pimpinan KPK yang enggak jelas latar belakang pendidikan dan pengalamannya kemudian ditetapkan sebagai penuntut umum, ini sudah kebangetan," papar anggota Komisi II ini.

Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo (F-Golkar) menyebutkan DPR bersama Pemerintah berkewajiban untuk melakukan evaluasi yang merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban moral dan politik. (ann,mp)/foto: jayadi/parle/iw.

MARAK KORBAN MIRAS OPLOSAN, PEMICU GOLKAN RUU MINOL

PERISTIWA di Sleman Yogyakarta dimana 26 orang meninggal karena miras oplosan, sekaligus menjadi pemicu yang lebih kuat lagi bagi Pansus RUU Minuman Beralkohol (Minol) untuk sesegara mungkin menggolkan RUU Minol. Dalam RUU ini juga diatur mengenai jenis-jenis miras termasuk miras



Anggota Pansus RUU Minol Ahmad Mustakim

oplosan.

Demikian ditegaskan anggota Pansus RUU Minol Ahmad Mustakim di Gedung DPR, Rabu (10/2). Menurutnya, besarnya jumlah korban miras oplosan sesuai kabar terakhir sampai 34 orang, ternyata tidak hanya satu pedagang atau pengedar. Ternyata ada beberapa pengoplos dan pengedar yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. "Memang yang paling banyak di Sleman atas nama Sasongko itu," ungkap Mustakim.

Yang sungguh mengerikan, bahan bakunya ditemukan ada satu jergen obat nyamuk cair. Bagi anggota Komisi VIII DPR, ini sudah sangat tidak pantas dan tidak manusiawi terkait dengan bisnis yang mengakibatkan korban jiwa banyak orang.

Sedangkan dari sisi regulasi, dia mengatakan, bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain bahwa RUU yang tengah disusun ini diharapkan mampu sampai pada penindakan. Tidak cuma sekadar pengaturan, pengawasan sebab banyaknya tempat kejadian miras oplosan. Karena itu dengan upaya Pansus Minol yang diusulkan FPP, maka RUU Larangan Minol seharusnya didukung semua elemen terkait.

Mengenai adanya usaha atau momen tertentu penggunaan miras, bisa dimasukkan dalam pasal-pasal tertentu yang sifatnya pengecualian. Dalam RUU Minol lanjut Mustakim, juga mengatur minuman-minuman racikan dan bisa ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas dan bila ada unsur pidana maka diserahkan kepada pihak berwajib. "Tanpa itu maka pasti akan semakin hari semakin banyak korban-korban lain karena lemahnya penindakan," tegasnya.

Soal rumusan spesifik dalam RUU, Mustakim mengatakan, namanya oplosan tergantung pada pembuat. Meski ada black label, ternyata di lapangan tidak orisinal, banyak juga black label yang palsu atau turunan. Pernah ada pedagang yang mengoplos black label kemudian dijual, apalagi pedagang kecil yang cenderung akan menggunakan barang semurah mungkin dengan tujuan memberikan efek alkohol lebih keras tapi malah peminum meninggal. "Ini sudah sangat tidak manusiawi sehingga harus didukung elemen terkait untuk menggolkan RUU Minol ini. Dengan demikian target pada Juni mendatang RUU Minol bisa disahkan," imbuh politisi FPP asal Jateng ini. (mp) foto: arief rachman/parle/hr.

RINDU AL-QURAN, PIA DPR-RI GELAR PENGAJIAN

Jika sebelumnya Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI menyelenggarakan banyak program sosial dan seminar, Rabu (10/2) PIA DPR menggelar pengajian di Masjid Baiturahman, Senayan Jakarta.

"PENGAJIAN ini merupakan ide atau gagasan dari Ibu Grace Fadli Zon, Ibu Ketua PIA terdahulu, Ibu Deisti Novanto. Ternyata setelah didiskusikan ke Ibu Ketua PIA Netty Ade Komarudin, beliau sangat menyambut baik ide tersebut," ungkap Ketua Panitia pengajian PIA DPR RI, Latifah Mahfudz Abdurahman

Sementara itu Ketua PIA DPR RI, Netty Ade Komarudin mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik gagasan tersebut mengingat selama ini tidak jarang diantara kita membuka dan membaca Al Quran namun terkadang lupa untuk mengamalkannya.

"Saya sangat menyambut baik ide penyelenggaraan pengajian PIA ini yang

merupakan sebuah bentuk kerinduan kami akan Al Quran. Karena tidak jarang diantara kita membuka dan membaca Al Quran namun lupa untuk mengamalkannya. Padahal Al Quran merupakan penyelamat manusia di akhirat kelak. Di dalam Al Quran tercantum segala hal yang terjadi di kehidupan lalu, sekarang dan yang akan



Suasana pengajian PIA DPR RI

datang," jelas Netty Ade Komarudin. Dilanjutkan Netty, dalam pengajian ini anggota PIA juga dapat bertanya tentang segala hal yang dialami dan ada

dalam kehidupan ini ditinjau dari perspektif Islam. Dengan demikian diharapkan anggota PIA dapat lebih arif lagi dalam bertindak dan berperilaku

ke depan. Terutama dalam mendukung tugas suami sebagai wakil rakyat, pengemban amanah rakyat.

Dalam kesempatan tanya jawab, Grace Fadli Zon misalnya mempertanyakan pandangan Islam akan isu LGBT (Lesbian, gay, bisek, transgender) yang tengah marak. Dikatakan Nurul Hidayati Al Muzamil Yusuf yang saat itu tampil sebagai ustadzah (penceramah) menjelaskan bahwa pandangan Islam terhadap LGBT sudah jelas, yakni menganggap hal tersebut sebagai sebuah penyimpangan seksual yang harus "diobati", dan tidak dijadikan pro kontra.

Mengingat pentingnya acara ini, baik Netty, Grace, dan seluruh anggota PIA DPR sepakat untuk menjadikan pengajian tersebut sebagai kegiatan rutin PIA dalam setiap bulannya. (Ayu)/foto:rizka/parle/iw.

KOMISI I DESAK PEMERINTAH SELESAIKAN DCA



Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya

ANGGOTA Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya mendesak pemerintah untuk menyelesaikan DCA (defense cooperation agreement) atau perjanjian pertahanan Indonesia-Singapura. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja Komisi I dengan Menteri Luar

Negeri, Retno Marsudi, Selasa (9/2) di Senayan Jakarta.

Singapura dijelaskan Tantowi, pada awalnya tidak bisa menandatangani ekstradisi, padahal Indonesia sangat berkepentingan, yakni untuk membawa kembali ke tanah air penggelap uang

pajak, koruptor, dan tersangka lain yang bermukim di negara tersebut.

Alasan Singapura tidak bisa menandatangani perjanjian ekstradisi karena sejauh ini Indonesia tidak memiliki perjanjian pertahanan (DCA) dengan Indonesia. Sementara untuk penandatanganan DCA masih ada beberapa titik yang belum disepakati bersama.

"Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan sejak tahun 2004, maka Singapura tidak memiliki kewajiban untuk mengekstradisi para penggelap pajak, koruptor ke Indonesia. Sementara Singapura bisa berlatih perang di Indonesia dan di negara tetangga yang memiliki medan seperti Indonesia," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Oleh karena itu menurut Tantowi, Pemerintah bersama DPR perlu mengkaji langkah ke depan apa yang akan diambil oleh Indonesia. Mengingat hal ini sudah berlangsung sejak 2004 silam, dan tidak bisa terus dibiarkan. (Ayu), Foto: ray/parle/ry

DITO : PENGHAPUSAN PREMIUM DI DKI JAKARTA, MASYARAKAT JANGAN DIRUGIKAN



Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto

TERKAIT rencana Gubernur DKI Jakarta menghapus premium di DKI Jakarta, Anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto mengharapkan jangan sampai transportasi umum khususnya dan masyarakat kecil umumnya dirugikan.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mewacanakan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dari Jakarta. Menurut Ahok, premium lebih baik dialihkan untuk subsidi transportasi massal daripada dikonsumsi kendaraan pribadi.

Menurut Dito, jika ada niat dari Gubernur DKI Jakarta untuk menutup

premium yang ada di Jakarta memang tujuan premium ini adalah untuk masyarakat mampu. Premium ini, tegas Dito, sebetulnya tidak disubsidi, tetapi kenyataannya sampai saat ini pemerintah menjual premium di bawah harga pokok pertamina. Beberapa waktu lalu, terang Dito, pertamina ada kerugian dengan adanya penjualan premium ini.

"Tetapi apabila masyarakat yang tidak mampu ini agak berat kalau mereka langsung pindah ke pertalite, pertamax dan pertamax plus, kami menyarankan pemerintah bersama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mengkaji kembali daerah-daerah mana yang tidak bisa menjual

premium dan daerah-daerah mana yang bisa. Khusus ini, jangan sampai transportasi umum dan masyarakat kecil dirugikan," papar politisi Partai Golkar ini di sela-sela pertemuan Tim Panja Migas Komisi VII DPR dengan Pt. Dirut Pertamina (Persero) dan jajaran Direksi ISC Pertamina di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Ia menjelaskan, Indonesia memang sudah harus beralih ke Bahan Bakar Gas (BBG). Program konversi ke BBG, jelas Dito, merupakan program yang sudah lama dibuat Komisi VII DPR. Namun, tegasnya, tentunya konversi dari BBM ke BBG ini harus

dilakukan bertahap.

"Dan sekarang, Bus sudah mulai dan kendaraan transportasi umum seperti taksi sudah diusahakan menggunakan BBG. Sehingga mengurangi ketergantungan kita dengan minyak," imbuhnya.

"Dan pertamina harus sudah siap, program konversi dari BBM ke BBG ini sudah kami bahas tiga tahun yang lalu dan tentunya harus bertahap dan pertamina harus siap," tegas Dito.

Dalam kesempatan yang sama, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Wianda A. Pusponegara menyatakan PT Pertamina (Persero) terbuka untuk opsi-opsi untuk pengaturan distribusi BBM secara tepat sasaran.

"Mungkin ada harapan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meneruskan program konversi dari BBM ke BBG, tapi ini tentunya perlu penguatan-penguatan dan percepatan-percepatan," kata Wianda.

Ia mengharapkan ada pembicaraan lebih lanjut antara Kementerian ESDM, Pemprov DKI Jakarta dan PT Pertamina (Persero).

"Pada intinya, Pertamina harus siap jika kenyataan nantinya pengalihan lebih banyak ke gas. SPBG kami di Jakarta ada 18, termasuk kami juga harus siap menyediakan bahan bakar seperti pertalite, pertamax dan pertamax plus," ujarnya. (sc) / foto:devi/parle/iw.

KOMISI X TEMUKAN BEBERAPA SEKOLAH DI MEDAN BELUM SIAP UN ON-LINE

BELUM semua sekolah di Medan Sumatera Utara siap menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UN Online) Tahun 2016 karena masih terkendala jumlah komputer yang belum memadai.

Demikian salah satu hasil temuan dari

Kunjungan Lapangan ke beberapa sekolah di Medan oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Sutan Adil Hendra (SAH) Kamis siang (4/2).

Menurut Sah, demikian politisi

Gerindra ini biasa disapa, dari hasil pantauan Komisi X DPR RI di SMA Negeri 5 Medan baru memiliki 28 unit komputer sementara jumlah siswa yang akan mengikuti UN Online sekitar 400 siswa.



Tim Kunspek Komisi X DPR meninjau SMAN 5 Medan

"SMA Negeri 5 Medan masih butuh minimal 172 komputer lagi untuk memenuhi kebutuhan minimal 200 komputer PC guna mendukung terlaksananya UN *Online* Tahun 2016 ini," ungkapnya.

Politisi Daerah Pemilihan Jambi ini juga mendorong semua pihak baik Kemendiknas dan Pemprov Sumut untuk bahu-membahu memenuhi sarana dan prasarana pendukung agar pelaksanaan UN *Online* Tahun 2016 ini lebih baik dari tahun lalu.

Ia menambahkan, bahwa apa yang menjadi temuan Komisi X DPR RI akan dicatat dan menjadi bahan masukan berharga saat Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan Nasional di DPR pusat Senayan nantinya.

"Dengan kehadiran Tim Kunspek

Komisi X DPR RI ini diharapkan semua pemangku kepentingan pendidikan di Medan bangkit bersama-sama mempersiapkan anak didiknya dan sarana sekolah agar minimal Medan masuk 10 besar dengan hasil UN terbaik tahun ini," pungkash Sah disambut riuh para guru.

Sementara itu, Perwakilan Mendiknas Pusat yang ikut dalam rombongan, Tengku Ramli mengungkapkan bahwa UN saat ini memang tidak lagi menjadi penentu kelulusan tunggal namun demikian bukan berarti menjadi tidak penting lagi.

"UN berbasis komputer (*online*) meningkatkan kredibilitas karena sulit disalahgunakan," ungkap Tengku.

Dirinya menambahkan bahwa materi ujian UN 2016 sesuai yang sudah diajarkan oleh Kurikulum Tahun 2006 (K2006) dan Kurikulum Tahun 2013 (K13). Sekolah dihimbau agar mempersiapkan siswanya dengan baik. (oji), foto : Naefurodji/parle/hr.

DPR DUKUNG PINDAD HADAPI MEA

WAKIL Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Agus Hermanto, mendukung PT Pindad (Persero) semakin kompetitif menghadapi pasar bebas di era Masyarakat Ekonomi Asean. BUMN yang menjadi andalan industri pertahanan dalam negeri ini dinilainya sudah membuat sejumlah langkah maju dalam mengembangkan usahanya.

"Saya bersama Wakil Ketua BURT, Anggota Komisi III dan Komisi VI DPR ingin meninjau perkembangan PT. Pindad, sekaligus ingin memberikan dukungan lebih tajam lagi bagi PT. Pindad sebagai industri yang kompetitif dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean," katanya dalam pertemuan di Auditorium Gedung Direktoral Kantor Pindad, Bandung, Jabar, Senin (25/01/16).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu yakin, dengan langkah maju yang dilakukan

PT Pindad dalam melaksanakan operational agility, sehingga memiliki kesempatan yang besar dalam MEA.



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tinjau produk PT. Pindad

"Untuk itu, diupayakan PT Pindad harus dapat memperluas dan mengekspansi usaha ke negara-negara ASEAN, baik untuk memperluas market maupun untuk alasan lebih mendekatkan dengan pasar sehingga peluang keuntungan menjadi lebih terbuka," imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Dalam kunjungan ini, Agus didampingi Wakil Ketua BURT DPR, Agung Budi Santoso; Anggota Komisi III Didik Mukrianto, dan Anggota Komisi VI Wahyu Sanjaya. Rombongan diterima langsung Direktur Utama PT. Pindad

(Persero), Silmy Karim.

Dirut PT Pindad dalam sambutannya menyebut kehadiran Waka DPR sebagai bentuk kepedulian pada perkembangan industri pertahanan nasional. Apalagi, sebelumnya juga Agus pernah mengunjungi Pindad, saat menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR. Silmy menggarisbawahi bahwa saat ini Pindad sedang optimis dalam mencapai beberapa target yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang.

"Tahun ini kita banyak melakukan upaya perbaikan manajemen, transformasi dan produk unggulan yang sudah maupun yang akan kita keluarkan. Kami memiliki optimisme sebagai industri kebanggaan rakyat Indonesia," ujar Silmy optimis.

Usai pertemuan rombongan DPR diajak meninjau langsung produksi peralatan pertahanan dan keamanan maupun peralatan pelengkap konstruksi. Silmy mengatakan, kemampuan produksi inilah yang akan terus didorong oleh PT Pindad. (HR/sf/iky), foto : eka hindra/parle/hr.

KOMISI X PANTAU PERSIAPAN UN ON LINE DI SULTENG



Tim Kunspek Komisi X DPR meninjau SMKN 3 Palu

KOMISI X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Ke Sulawesi Tengah dalam rangka memantau kesiapan sekolah yang akan melakukan Ujian Nasional (UN) berbasis komputer (Computer Based Test/CBT) atau UN Online. Dari tiga sekolah yang di kunjungi mereka mengeluhkan terjadinya pemadaman listrik saat ujian.

Itulah salah satu hasil pantauan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI saat meninjau tiga sekolah yang di rekomendasikan Kemendikbud sebagai sekolah yang mampu menyelenggarakan UN CBT di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (4/2).

Wakil Ketua Komisi X DPR Adul Kharis Almasyhari menjelaskan bahwa dia dan rombongan datang untuk memantau serta mendengar secara langsung hambatan-hambatan apa saja dalam proses persiapan UN online di Palu. Dalam

pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.

UNBK saat ini menggunakan sistem semi-online yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online.

"Tahun ini jumlah penyelenggara UN CBT memang jauh lebih banyak. Karena ke depan arahnya semua memakai CBT. Kemungkinan jumlah ini pun masih bisa bertambah karena info terakhir sekolah yang bekerjasama dengan sekolah luar negeri juga harus pakai sistem CBT," ujar politisi PKS ini.

"Semua temuan serta masukan dari pihak sekolah selaku penyelenggara akan menjadi bahan evaluasi dengan jajaran pemerintahan terkait," ujar Kharis dalam sambutannya

Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun lalu, baru sebanyak 500-an sekolah percontohan pelaksana ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Tahun ini sebanyak 4.468 sekolah yang akan menggelar ujian nasional dengan

komputer tersebut. Jumlah tersebut kemungkinan bertambah mengingat ada 120 sekolah yang masih dalam proses klarifikasi. Ujian nasional berbasis komputer akan berlangsung di 1.030 SMP, 1.324 SMA/MA, dan 2.114 SMK. Jadi total ada 4.468 sekolah, menjangkau 929.036 siswa yang akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Sedangkan UN perbaikan yang akan dilaksanakan pada 22 Februari - 5 Maret 2016 mendatang, sebanyak 69.690 siswa yang telah mendaftar untuk mengikuti UN perbaikan ini.

Pendaftaran telah berlangsung sejak 28 September - 15 November 2015 yang lalu. Saat ini soal untuk UN perbaikan telah siap dan akan dilaksanakan dengan berbasis komputer.

Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker Spesifik persiapan UNBK, Teuku Riefky Harsya menambahkan, sejak 2015 yang lalu, sekolah-sekolah yang menjalankan UN mendapat dua komponen laporan, yaitu akademik dan integritas. Pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota juga menerima laporan ini. Riefky berharap, melalui laporan tersebut, revolusi mental dalam dunia pendidikan dapat diwujudkan, di mana kejujuran menjadi aspek yang penting dan mendasar.

"Saya menyadari penyelenggaraan UN online ini tidaklah mudah, oleh karenanya sekolah harus serius dalam menyiapkan segala sesuatunya," pungkas Riefky. ([andri,mp](#)), foto : [andri/parle/hr](#).



Pansus Angket Pelindo II menyerahkan dokumen kepada BPK RI

PANSUS PELINDO II SERAHKAN DOKUMEN PENDUKUNG INVESTIGASI KE BPK

PANITIA Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II DPR dipimpin Ketuaanya Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP) menyerahkan dokumen pendukung untuk investigasi kasus Pelindo II kepada anggota BPK RI Achsanul Qosasi di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (05/02).

"Berkas - berkas tersebut kami kumpulkan selama melakukan persidangan Pelindo II dari beberapa pihak seperti Kementerian, para pakar, dan institusi keuangan," ujar anggota



Pansus Pelindo II Nurdin Tampubolon.

Ketua Pansus Rieke juga mengapresiasi langkah cepat yang sudah dilakukan BPK dalam menindaklanjuti permintaan Pansus Pelindo II atas dibentuknya tim audit investigatif.

Anggota BPK Achsanul Kosasi menyebutkan pihaknya (BPK) telah melakukan sidang badan serta membentuk tim audit investigasi gabungan dari seluruh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) meliputi Perbankan, Hukum,

Departemen Kementerian Perhubungan, dan Kepentingan Daerah. "Nanti secara simultan kita akan melakukan komunikasi dengan DPR terkait perkembangan investigasi," paparnya.

Turut serta hadir dalam acara ini, Wakil Ketua Pansus Pelindo II DPR RI Teguh Juwarno (F-PAN) didampingi anggota Nurdin Tampubolon (F-Hanura), John Kenedy Azis (F-PG) dan Wahyu Sanjaya (F-PD). (ann,mp), foto : arief rachman/parole/hr.

SEKJEN DPR LANTIK DAN KUKUHKAN PEJABAT ESELON 3 DAN 4

DPR RI sebagai lembaga negara sekaligus lembaga politik bergerak sangat dinamis. Sekretariat Jenderal DPR sebagai unsur pendukung dewan juga dituntut untuk mampu mengikuti dinamika kedewanan. Atas dasar itulah, Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti, Kamis (4/2) malam melantik dan mengukuhkan Pejabat eselon 3 dan 4 dalam stuktur Kesetjenan DPR RI.

"Ketiga kalinya Sekretariat Jenderal melakukan penataan kembali pejabat-pejabat di lingkungan Setjen DPR. Tidak mudah memang memilih dan menempatkan orang-orang di posisi yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik masing-masing. Karena ada AKD (alat kelengkapan dewan) dan komisi yang sudah cocok dengan kerja serta



Suasana pelantikan Pejabat Eselon 3 dan 4 di Lingkungan DPR

karakteristik orang tertentu, namun orang tersebut harus ditempatkan ke posisi lain," jelas Win, begitu ia biasa disapa.

Dengan begitu lanjut Win, penggantinya pun harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik yang diinginkan. Dan atas diskusi dari semua pihak, akhirnya kali ini Sekjen DPR untuk ketiga kalinya

melantik dan mengukuhkan pejabat-pejabat eselon 3 dan 4 dengan jumlah 118 orang.

Dalam sambutannya, Win berharap, seluruh pejabat yang dilantik dan dikukuhkan kembali itu mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Sekalipun orang tersebut sebelumnya berasal dari latar belakang instansi yang berbeda, namun diharapkan tetap mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan cepat dan baik antar sesama unsur pendukung dewan. Begitupun dengan adanya warna-warni partai politik di kedewanan, diharapkan seluruh jajaran kesetjenan mampu menjalankan tugas dan fungsinya yang netral. (Ayu), foto: eno, dev/parole/hr.

KOMISI III DPR RI meminta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso meningkatkan pengawasan dan sinergitas lintas sektoral dalam perang melawan narkoba hingga wilayah perbatasan, serta peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di seluruh Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan BNN, Kamis (4/2) di Senayan Jakarta.

"Sebelumnya BNN memiliki program sosialisasi bahaya narkoba di daerah-daerah, termasuk di Dapil (daerah pemilihan-red) anggota Komisi III, sayangnya saat ini program tersebut tidak dimaksimalkan bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi," ungkap anggota Komisi III, Nasir Djamil.

Dilanjutkan politisi dari Fraksi PKS ini, minimnya anggaran yang dimiliki BNN bukan sebuah halangan untuk terus

BNN DIMINTA INOVATIF DALAM PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN NARKOBA



Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil berdialog dengan Kepala BNN Budi Waseso

menjalankan program tersebut, mengingat setiap anggota DPR juga memiliki dana aspirasi dan dana reses untuk dapil masing-

masing. Tidak salah jika dana tersebut digunakan DPR untuk melakukan penyuluhan, diskusi, seminar tentang bahaya Narkoba ke pelosok-pelosok daerah, tentunya bekerjasama dengan BNN.

Oleh karena itu ia berharap agar BNN bisa lebih inovatif dalam melakukan pengawasan dan pencegahan bahaya narkoba hingga pelosok-pelosok. Salah satunya dengan menjalin sinergitas lintas sektoral dengan berbagai organisasi, badan, lembaga lainnya, termasuk dengan DPR RI. Dengan demikian selain bisa melakukan penghematan anggaran, tugas dari BNN pun dapat terbantu. (Ayu/iky)

PERLU SANKSI TEGAS BAGI POLITIK UANG



Anggota Komisi II DPR Dadang Muchtar

PILKADA serentak 2015 berjalan dengan tertib serta tanpa ditemukan kerusuhan, namun ada catatan yang perlu dikritisi yakni masih maraknya politik uang.

“Perlu ada sanksi bagi pihak yang melakukan politik uang, dengan apa? Gugurkan,” tandas Dadang Muchtar (F-

Golkar) ketika melakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Husni Kamil Manik (Ketua KPU), Muhammad (Ketua Bawaslu) dan Jimly Assidique (Ketua DKPP) di ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin, (01/02).

“Saat ini politik uang bukan hanya terjadi pada partai politik saja, tetapi sudah menyebar ke banyak lembaga. Beri sanksi yang tegas, beri metode pencegahan yang terbaik, sehingga politik uang tidak lagi menjamur. Jangan harapkan sistem demokrasi saat ini melahirkan pemimpin yang bagus dan profesional jika dalam prosesnya saja masih ditemukan politik uang,” ujar pria kelahiran Cirebon dari Dapil Jawa Barat VII ini.

Saat ini memang tidak ada sanksi pidana dalam UU Pilkada tetapi praktek politik uang dapat dipidana melalui KUHP dalam pasal 149 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.”

Namun, menurut mantan Bupati Karawang ini, aturan yang tertuang dalam KUHP belum maksimal. “Ayo pikirkan bersama mengurangi politik uang, karena ini adalah fakta yang masih banyak ditemukan. Tolong pikirkan negara ini perlu dibawa kemana. Mari revisi UU Pilkada secepatnya untuk Republik yang lebih baik.”pungkasnya. (hs,mp), foto : rni/parle/hr.

BUMN TAK BOLEH SEMBARANGAN GUNAKAN ASET NEGARA DALAM PROYEK KAC

KETUA Komisi VI DPR-RI A. Hafisz Tohir mempertanyakan rencana pemerintah membangun kereta api cepat (KAC) atau high speed railway (HSR) Jakarta-Bandung. Dia mempermasalahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sampai saat ini tidak melakukan koordinasi dengan Komisi VI. Padahal Komisi VI yang memiliki ruang lingkup dan pasangan kerja dalam bidang industri, perdagangan, saham milik negara, BUMN, investasi dan persaingan usaha.

Mega proyek yang ditargetkan memakan dana dengan total investasi setara dengan IDR 78 triliun ini terselenggara atas persahaman konsorsium BUMN dengan nama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan China Railway Internasional.

“Selayaknya kementerian BUMN itu harus berbicara dengan Komisi VI tapi sampai saat ini belum pernah dilakukan,” ujar Hafisz dengan wajah terheran-heran saat acara Diskusi Publik yang bertajuk



Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir



"Stop Rencana Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung" di Operation Room (Ruang Kaca) Gedung Nusantara DPR, Selasa, (2/2).

Menurut anggota Dewan dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I ini, dalam kerjasama antara BUMN dengan perusahaan China terdapat perjanjian internasional, dan sesuai dengan mandat konstitusi, perjanjian tersebut harus ada izin dari DPR-RI, sebagai lembaga legislatif yang mengawasi dan membuat undang-undang.

Hafisz melanjutkan, terlebih lagi, pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung telah menggunakan aset negara. Jalur kereta yang dibangun oleh *China Railway International* merupakan tanah milik negara. "BUMN harus jadi agen

development. Tidak boleh sembarangan BUMN menggunakan aset negara," tegasnya.

Ditengarai bahwa keputusan pembangunan KAC Jakarta-Bandung lebih didominasi oleh keinginan donor, yakni China, bukan atas keputusan Pemerintah RI secara mandiri. Apalagi, proyek KAC tidak masuk dalam prioritas nasional sebagaimana proyek tol laut yang selama ini dikampanyekan oleh Presiden Jokowi.

Hafisz menambahkan, keputusan pembangunan proyek KAC tidak diambil melalui kajian komprehensif yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga negara terkait, sehingga berbagai persyaratan kelayakan proyek, termasuk perizinan belum diperoleh saat

groundbreaking dilaksanakan. "Komisi VI meminta pemerintah mengkaji ulang jika perlu menolak," tegasnya.

Dalam diskusi tersebut Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah juga menyinggung bahwa pembangunan KAC Jakarta-Bandung lebih didominasi oleh pertimbangan aspek bisnis dibandingkan pembangunan yang seharusnya mempertimbangkan aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan sebagainya.

"BUMN itu tugas utamanya untuk kesejahteraan rakyat, menjadi pipa-pipa kesejahteraan ke rumah rakyat. BUMN bukan sekedar pebisnis. Dia harus menciptakan keuntungan untuk rakyat, menjadi fasilitator kesejahteraan," papar Fahri. (eko,mp), foto : rni/parle/hr.

DEWAN MINTA PEMERINTAH TIDAK GUNAKAN PENDEKATAN MARKET EKONOMI

SEBAGAIMANA kita ketahui di tahun 2016 ini Indonesia masuk dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dimana ada kekhawatiran dari dunia industri mengenai harga produknya. Anggota Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha minta kepada pemerintah dalam hal ini Dirjen Migas Kementerian ESDM dalam menentukan harga minyak dan gas tidak menggunakan pendekatan market ekonomi.

"Kalau kita masih menggunakan pendekatan konservatif dimana pemerintah tidak adaptable, saya tidak yakin kalau Indonesia menjadi kompetitif dari sisi hilir yang menggunakan daripada gas itu. Tetapi kita mesti menyadari, kita juga tidak boleh market ekonomi," kata Satya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, Dirut Pertamina (Persero), dan Dirut PT Perusahaan Gas Negara (Persero) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Ia menjelaskan, begitu produk luar masuk di Indonesia, natural resources kita



Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha

itu harus diintervensi pemerintah. Karena itu merupakan esensi Pasal 33 UUD 1945 seperti yang disampaikan Kepala BP Migas Andi Noorsaman Sommeng dalam rapat tersebut, dimana diatur oleh negara, ada intervensi.

"Ini yang menjadi permasalahan mendasar menurut saya, kita masuk MEA tetapi kita tidak siap sebetulnya dari semua perangkat hukumnya," ujar politisi Partai Golkar ini.

Jika kita masih menggunakan perangkat aturan dimana intervensi pemerintah ada, lanjut Satya, kita otomatis harus melakukan regular checking agar harga itu bisa kompetitif. Jika tidak produk dalam negeri akan kalah bersaing. Kecuali

jika disisi hilirnya disubsidi.

"Jadi produknya yang disubsidi, kalau tidak dia akan menjerit. Kita tidak bisa berkompetisi dengan Vietnam atau dengan negara yang lainnya. Sementara jika sekarang kita promosikan regional price tidak mungkin. Karena begitu masuk regional price itu against constitution," imbuhnya.

Ia menilai formula harga gas pemerintah yang disampaikan dalam rapat tersebut sudah bagus. Hanya pemerintah harus memberikan time prime sampai kapan menggunakan formula tersebut. "Ini mesti kita review dari waktu ke waktu. Kapan kita merubahnya dan dasarnya apa," tandas Satya.

"Sekarang kita harus menetapkan satu waktu yang secara regular kita melakukan review mengenai harga ini. Saya yakin apa yang dikeluhkan industri menjadi masalah tersendiri. Belum lagi berhadapan dengan import gas aturannya bagaimana," paparnya.

Seperti yang sudah dijelaskan Satya, bahwa UUD 1945 tidak memungkinkan Indonesia untuk market price. Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin

Wakil Ketua Komisi VII Fadel Muhammad tersebut, Satya memberikan contoh, bahwa jika Indonesia impor gas dari *middle east* itu lebih murah itu satu dan lain hal, lalu bagaimana Indonesia mengaturnya begitu itu masuk di domestik. Menurutnya, Dirjen Migas harus memikirkannya. Menurutnya, Itu sesuatu yang tidak bisa di stop.

“Jadi formula harga gas impor begitu masuk di Indonesia kan tidak bisa, misalkan Qatar dia jual ke Amerika, Jepang dia bisa pakai GCC atau apa saja, tapi begitu masuk ke Indonesia, formula apa yang dipakai, negosiasi kan?” tanya pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

“Begitu negosiasi, apakah kita bisa kompetitif kalau ternyata harganya katakan harus rendah sekali, sementara cara kita melihat harga gas domestik berdasarkan daripada lapangan,” imbuhnya.

Kesulitan lapangan kita itu, tandas Satya, bisa terbunuh harganya dengan kompetisi dari harga luar yang masuk. “Cost per barel yang ada di Qatar dan cost per barel yang ada di Indonesia pasti beda, beda lapangannya mungkin lebih mudah di sana karena reservenya yang luar biasa besar,” mantapnya.

“Jadi ini menurut saya yang merupakan PR luar biasa. Menurut saya Panja Migas Komisi VII harus mendalami ini juga. Karena kalau tidak nanti, kita dari waktu ke waktu hanya dikritisi yang akhirnya Dirjen akan kerepotan untuk mengatur harga karena negara memang harus mengatur harga,” terang Satya.

Menurut Satya, begitu pula konteksnya dalam formula harga BBM. Sebetulnya ia tidak sepakat dari dulu. Dirinya masih ingat, karena waktu itu ia yang memimpin rapatnya. Diputuskan

reviewnya 6 bulan, kemudian ada kalimat bisa direview setiap saat apabila ada hal-hal kritis. Kalau modelnya seperti itu, kata Satya, sama saja kita lepas dipasar.

“Justru yang kita pikirkan adalah ada waktu tertentu untuk masyarakat menikmati harga pada kurun waktu tertentu. Disinilah letak intervensi negara, dinilai saatnya negara melindungi rakyat kita,” mantap Satya.

Dijelaskan Satya, jika ada selisih ternyata harga pasar lebih rendah dibandingkan dengan harga yang rakyat jual, dalam arti rakyat mensubsidi negara. Ia minta itu dipertanggungjawabkan saja selama tiga bulan. “Inilah ada yang dibayar oleh rakyat. Kalau itu mau dimasukkan ke dalam dana ketahanan energi ataupun apa nantinya itu ada mekanisme dalam APBN yang bisa kita atur,” kata Satya. (sc), [foto : iwan armanias/parle/hr](http://foto: iwan armanias/parle/hr).

BALEG BAHAS RUU KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

RAPAT Pleno Badan Legislatif (Baleg) dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo sepakat RUU Kewirausahaan Nasional dibawa ke Paripurna untuk disetujui menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI.

“Kunci kemajuan suatu negara adalah seberapa banyak entrepreneur ada di negara tersebut” ujar Martin Hutabarat (F-Gerindra) dalam Pleno Baleg di Gedung Nusantara 1, Selasa (02/02).

Menurutnya, *entrepreneurship* adalah suatu budaya kemandirian untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja untuk menggerakkan pembangunan ekonomi masyarakat.

Kini, prosentase enterprenuer yang ada di Indonesia hanya 1,65% dari jumlah penduduk. Masih sangat jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga contohnya Malaysia, Singapura dan Thailand dengan prosentase mencapai diatas 4%.

“Lahirnya RUU ini memiliki peran strategis dan cukup signifikan dalam

mendorong perekonomian nasional,” ujar Jefirston Riwu Kore (F-Demokrat).

Senada, politisi Gerindra Martin Hutabarat juga menekankan bahwa entrepreneur hanya bisa tumbuh kalau ada iklim yang kondusif, meliputi modal, aturan main dan persaingan yang sehat. “Tidak bisa entrepreneur muncul di negara yang KKN nya masih tinggi. Untuk itu perlu diatur dalam RUU ini, regulasi yang mendukung lahirnya wirausahawan baru,” tekannya.

Tak hanya itu, Esti Wijayanti (Fraksi PDI-P) menambahkan beberapa catatan khusus menyangkut substansi dari RUU Kewirausahaan Nasional ini yang berkaitan dengan pemberian insentif pajak impor, pembebasan bea masuk dan penangguhan pajak impor agar tidak disalahgunakan dan hanya berlaku terhadap

impor barang produksi.

Kesepuluh fraksi yang menjadi anggota badan legislatif mendukung RUU Kewirausahaan Nasional yang diusung oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. (ann/mp), [foto : arief/parle/hr](http://foto: arief/parle/hr).



Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo



PILKADA SERENTAK MASIH SISAKAN BANYAK PERSOALAN



Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan

MESKIPUN beberapa anggota Komisi II DPR memberikan apresiasi terhadap kinerja penyelenggara Pilkada Serentak yang berjalan damai tanpa kerusuhan, namun pandangan berbeda datang dari anggota FPDJ Perjuangan DPR Arteria Dahlan yang menilai penyelenggaraan Pilkada masih menyisakan banyak persoalan.

jika ditelisik mendalam akan ditemukan banyak persoalan,” ujar Arteria dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II pada Senin, (01/02).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman (F-Golkar) ini, Arteria juga mengkritisi suasana Pilkada yang sepi dari perdebatan. “Pemilu hening, tak ada nuansa

Dinamika perbedaan pendapat terjadi ketika Komisi II mengundang Husni Kamil Manik (Ketua KPU), Muhammad (Ketua Bawaslu) dan Jimly Asshidiqie (Ketua DKPP). “Penyelenggaraan Pilkada seolah bagus, namun

demokrasi. Yang berhajat hanya timses, parpol dan lembaga survey. Banyak uang yang dihabiskan untuk keperluan entertain sehingga rakyat tidak tereduksi. Buktinya, di pasar tidak banyak yang bicara politik,” papar Politisi asal Dapil Jawa Timur VI ini.

Selain itu, salah satu kritik datang khusus untuk KPU Kapuas Hulu. “KPU Kapuas Hulu harus diberi sanksi, di sana KPPS ditemukan telah bagi-bagi uang serta melakukan manipulasi suara,” ujar anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW) Djarot Syaiful Hidayat yang kini Wagub DKI tanggal 23 Maret 2015 lalu.

Selain itu, lanjut Arteria, ditemukan juga kecurangan yang dilakukan oleh Panwas. “Keterlibatan Panwas dalam kampanye perlu diperdalam. Di beberapa tempat, rumahnya Panwas dipakai sebagai posko kemenangan. Dalam Pilkada Serentak banyak sekali pemufakatan jahat,” pungkasnya. (hs,mp), foto : rni/parle/hr.

KERJA PEMERINTAH KENDALIKAN INFLASI SANGAT BAIK

MENYUSUL rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang angka inflasi pada 2015 yang mencapai 7,25 persen, Pemerintah dinilai sangat baik menjaga gerak inflasi tahun lalu. Artinya, kerja sama Pemerintah dan BI cukup baik dalam menjaga inflasi.

Demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara, sebelum mengikuti Rapat Paripurna, Selasa (2/2). “Inflasi itu memang domain pemerintah untuk menjaga harga-harga bahan pokok. Kalau misalnya inflasi kita di 2015 kemarin ditekan satu digit lagi, itu berarti apa yang dilakukan pemerintah bersama BI sudah berjalan baik.”

Amir berpandangan, angka inflasi yang dirilis sebetulnya tak perlu merisaukan. Yang terpenting adalah bagaimana ekonomi rakyat terus bergilut sehingga tetap bisa

survive. “Daya beli tidak bisa diukur hanya dari inflasi, tapi dari pendapatan dan juga pertumbuhan ekonomi. Saya melihat kerja-kerja pemerintah kemarin yang sudah mencabut subsidi tapi bisa mempertahankan inflasi, itu berarti kerja baik. Perlu kita apresiasi,” nilai Anggota F-PPP ini.

Sementara mengomentari inflasi yang terjadi pada Januari 2016 sebesar 0,51 persen, politisi asal dapil Sulawesi Selatan itu, menilai masih wajar. Apalagi, lanjutnya, pemerintah daerah juga cukup efektif menjaga inflasi lewat Badan Pengendali Inflasi Daerah (BPID). Selama ini angka inflasi nasional terjadi, karena akumulasi dari inflasi yang terjadi di daerah.

Ditambahkan Amir, sektor konsumsi masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi inflasi. “Saya dengar pada

Januari harga beras malah menjadi faktor pemicu. Sementara daging kecil sekali menjadi pemicu, karena masyarakat yang mengonsumsi daging belum sebanyak mereka yang mengonsumsi beras.” (mh)/foto:devi/parle/iw.



Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Anggota Komisi VI DPR Adang Daradjatun

KEPULAUAN SERIBU BISA MENJADI POROS MARITIM DUNIA

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Kepulauan Seribu bisa menjadi titik awal konsepsi Indonesia menjadi negara poros maritim kelas dunia. Secara ekonomi, tidak ada kepulauan di Indonesia yang pasarnya paling besar selain Kepulauan Seribu.

"Jika berbicara pasar, tidak ada pulau yang paling feasible secara ekonomi kecuali Kepulauan Seribu. Pulau ini dihimpit Jawa-Sumatra, setidaknya mencakup 3 provinsi yaitu Jakarta, Banten, dan Lampung. Pulau ini juga perlu dieksplorasi secara menyeluruh dan dijadikan pembangunan secara nasional," kata Fahri dalam pertemuan di kantor Bupati Kepulauan Seribu, Rabu (10/2).

Menurut Fahri, pengembangan Kepulauan Seribu ini jauh lebih penting daripada membangun infrastruktur darat

Jakarta-Bandung yang menghabiskan dana.

"Kita harus menarik kembali perhatian pemerintah seperti janji Jokowi saat kampanye. Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim," tekannya didampingi anggota Komisi VI Adang Daradjatun.

Ditambahkannya, Kepulauan Seribu juga bisa dijadikan sebagai konsep sekolah maritim. Mereka dapat belajar langsung, di sini semuanya sudah ada.

"Kalau saya jadi presiden, saya jual pesawat kepresidenan dan minta PT PAL buat kapal induk, sehingga Presiden bisa memimpin dari pantai, karena seluruh konsentrasi kemiskinan ada di pantai-pantai, walaupun ada juga di pedalaman, tetapi penanganannya berbeda," ujar politisi dari F-PKS ini.

Jadi, lanjut Fahri, menurut studi, masa depan Indonesia ada di laut "Kita mulai

dari Kepulauan Seribu," tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo dalam presentasinya menyebutkan, pemerintah daerah ingin menjadikan Kepulauan Seribu sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. "Memang ada kendala dalam menuju destinasi pariwisata kelas dunia seperti masalah infrastruktur dan non infrastruktur," kata Budi.

Kepulauan Seribu memiliki 110 pulau, 60 pulau milik pribadi. 11 pulau milik penduduk dan 39 pulau milik pemerintah. "Peningkatan pariwisata di Kepulauan Seribu harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan harus mendapatkan keuntungan," ujar Budi menambahkan. (jk,mp) Foto: Jaka Nugraha/parle/od



Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah didampingi Anggota Komisi VI DPR Adang Daradjatun di Kepulauan Seribu, Jakarta (10/02/2016). Fahri berharap Kepulauan ini bisa menjadi poros maritim kelas dunia.
Foto: Jaka Nugraha/Parle/HR



Komisi IV DPR menerima masukan dari Universitas Brawijaya, terkait RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Penambak Garam, di Malang (3/03/2016) Foto: Agung Sulistiono/Parle/HR



Komisi IV DPR meninjau Perum Bulog Divre Sulselbar, guna melihat ketersediaan dan keterjangkauan pangan nasional, di Makassar (3/02/2016). Foto: Iwan Armanias/Parle/HR



Tim Komisi IX DPR melakukan sidak ke RSUD Tangerang dan RS.Siloam Tangerang. Sidak ini dalam rangka memantau penyebaran virus Zika (4/02/2016). Foto: Jayadi/Parle/HR

